



LKIP 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selama tahun 2023 dan sebagai bentuk pengukuran kinerja dan evaluasi hasil analisis terhadap pencapaian target dalam indikator kinerja Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi LKIP Dinas Kesehatan Kota Bogor yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang pelaporan kinerja.

Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebanyak 3 (tiga) indikator diperjanjikan dalam perjanjian kinerja yang akan menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor. Pada tahun 2023, 3 (tiga) indikator yang menjadi IKU Dinas Kesehatan telah mencapai target. Adapun rincian realisasi per indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Point	0,46 Point	112,20 %	Sangat Baik
2	Meningkatnya rumah tangga sehat	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	71%	71,53%	100,75 %	Sangat Baik
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	81 Nilai	89,35 Nilai	110,31 %	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 1 di atas terdapat 3 sasaran strategis dari Dinas Kesehatan Kota Bogor yaitu Terwujudnya Keluarga Sehat, Meningkatnya rumah tangga sehat dan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan dengan 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 3 indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat bahwa 3 indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor telah mencapai target. Adapun indikator kinerja yang telah mencapai target yaitu Indeks Keluarga Sehat (112,20%), Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS (100,75%) dan Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah (110,31%).

Selanjutnya berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dan dijadikan acuan

dalam penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2023. Adapun sasaran, indikator kinerja utama, target, dan anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan berdasarkan pelaksanaan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023

Sasaran	Program	Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya Keluarga Sehat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	127.985.693.001	122.680.881.365	95,86
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	4.774.771.520	4.423.483.208	92,64
	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	907.788.200	866.192.000	95,42
Meningkatnya rumah tangga sehat	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	11.955.825.200	11.934.726.915	99,82
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	96.639.610.944	93.805.774.316	97,07
Total		242.263.688.865	233.711.057.804	96,47

Berdasarkan tabel 2. diatas diketahui pencapaian 3 Sasaran Strategis didukung oleh 5 program dengan total realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023 sebesar **Rp. 233.711.057.804 (96,47%)** dari total pagu sebesar **Rp. 242.263.688.865**.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Bogor ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai hasil pelaksanaan kinerja di Dinas Kesehatan serta dapat menjadi dasar bagi para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan di tahun berikutnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023 dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023 merupakan laporan yang disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Kesehatan yang telah mencapai target. Selain itu, kami berharap laporan ini dapat menjadi dasar bagi para pengambil keputusan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan kesehatan dimasa yang akan datang, sehingga mendukung terwujudnya transformasi kesehatan di Indonesia.

Demikian laporan ini kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga semua aktivitas yang kita lakukan selama ini menjadi amal ibadah dan kebaikan yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aamiin

Bogor, 01 Februari 2024

**KERALA DINAS KESEHATAN
KOTA BOGOR**



dr. Sri Nowo Retno, MARS

NIP. 19690415 199803 2 008

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN DAN MANFAAT.....	1
1.2.1 Tujuan	1
1.2.2 Manfaat.....	1
1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor	2
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	4
2.1 Perencanaan Strategis.....	4
2.2 Peta Proses Bisnis	6
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	6
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	7
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	7
3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja	10
3.2.1 Sasaran 1	10
3.2.2 Sasaran 2	15
3.2.3 Sasaran 3.....	18
3.2.4 Target dan Kinerja Program Tahun 2023	27
3.2.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	37
3.2.6 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya.....	38
3.3 Realisasi Anggaran	40
BAB 4 PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023	i
Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan berdasarkan pelaksanaan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023	ii
Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023	6
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	7
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	7
Tabel 3.3 Realisasi IKU Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021-2023.....	8
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu	9
Tabel 3.5 Capaian 10 Indikator PHBS Rumah Tangga Tahun 2019-2023	16
Tabel 3.6 Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB.....	20
Tabel 3.7 Perubahan Kebijakan Tentang Road Map Reformasi Birokrasi.....	21
Tabel 3.8 Capaian AKIP Pada Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2020-2023.....	22
Tabel 3.9 Capaian IKM Pada Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2020-2023	22
Tabel 3.10 Hasil Penilaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	23
Tabel 3.11 Capaian Indikator Program Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2020-2023.....	28
Tabel 3.12 Kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023.....	40
Tabel 3.13 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021-2023....	41

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor	3
Bagan 3.1 Capaian Indeks Keluarga Sehat di Kota Bogor	12
Bagan 3.2 Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	16
Bagan 3.3 Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah.....	18

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Indeks Keluarga Sehat Kota Bogor dengan Jawa Barat 12

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2019-2024, Dinas Kesehatan Kota Bogor berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya. Adapun instrumen pertanggungjawaban tersebut berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi pemerintah. Selain itu, proses penyusunan laporan kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran dengan mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja. Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kota Bogor.

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT

1.2.1 Tujuan

- a. Tujuan penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023 untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor selama Tahun 2023.
- b. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2.2 Manfaat

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023.
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023.
- c. Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor ditahun selanjutnya serta dimasa yang akan datang.

1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor

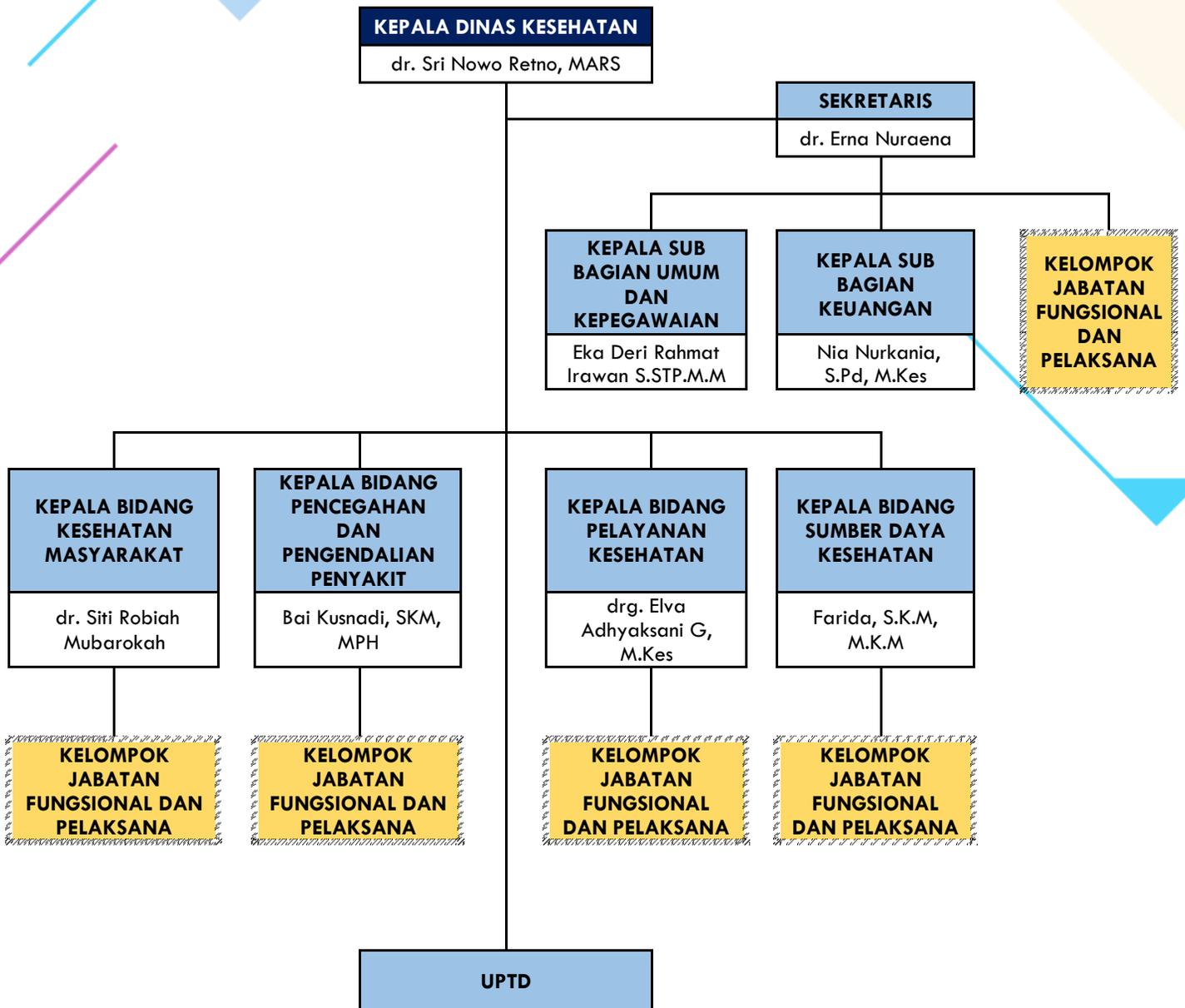
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 126 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang kesehatan.

Adapun susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor setelah dilakukannya penyederhanaan birokrasi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- g. UPTD Puskesmas terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- h. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Kesehatan Kota Bogor telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Akan tetapi, seiring dengan dinamika permasalahan yang terjadi pada tahun 2020, adanya Pandemi Covid-19 yang sangat berdampak secara global dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja Dinas Kesehatan, serta adanya perubahan kebijakan berkaitan dengan penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021, maka diadakan perubahan Renstra dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024.

Renstra Dinas Kesehatan disusun berpedomankan kepada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan bersifat indikatif. Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan mendukung Misi ke 1 dan 2 Kota Bogor. Misi 1 dan 2 yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran di tingkat kota selanjutnya diterjemahkan lagi ke dalam tujuan dan sasaran masing-masing perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Adapun cascading kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Visi Kota Bogor "Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota yang Ramah Keluarga"

Misi 1 "Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat"

Tujuan RPJMD	Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	
Indikator Tujuan RPJMD	Indeks Kesehatan	
Sasaran RPJMD	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat
Indikator Sasaran RPJMD	Angka Harapan Hidup (AHH)	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS
Tujuan Renstra Dinas Kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Terwujudnya pola hidup sehat di masyarakat
Indikator Tujuan Renstra Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS
Sasaran Renstra Dinas Kesehatan	Terwujudnya Keluarga Sehat	Meningkatnya rumah tangga sehat
Indikator Sasaran Renstra Dinas Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS

Misi 2

“Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas”

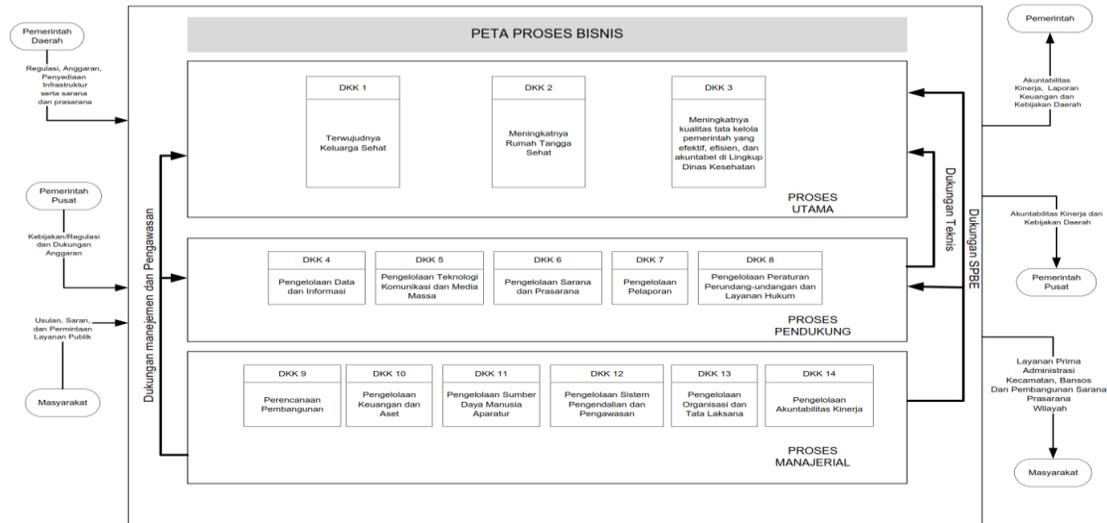
Tujuan RPJMD	Terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani (<i>smart government</i>)
Indikator Tujuan RPJMD	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran RPJMD	Terciptanya Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel
Indikator Sasaran RPJMD	Indeks Reformasi Birokrasi
Tujuan Renstra Dinas Kesehatan	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bogor
Indikator Tujuan Renstra Dinas Kesehatan	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran Renstra Dinas Kesehatan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan
Indikator Sasaran Renstra Dinas Kesehatan	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara sebagian urusan pemerintahan bidang kesehatan memiliki 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran guna mendukung pencapaian Misi 1 dan 2 Kota Bogor. Penjabaran program Dinas Kesehatan yang mendukung tercapainya kinerja dari tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Sasaran	Program
Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Terwujudnya Keluarga Sehat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	Terwujudnya pola hidup sehat di masyarakat	Meningkatnya rumah tangga sehat	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
			Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

2.2 Peta Proses Bisnis

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Nomor 800/200/I/DINKES/TAHUN 2023 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor, berikut ini merupakan Peta Proses Bisnis pada Dinas Kesehatan Kota Bogor :



2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dan selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023. Adapun sasaran, indikator kinerja utama, target, dan anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan
Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Point	136.492.201.687	133.668.252.721
Meningkatnya rumah tangga sehat	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	71%	12.328.780.000	11.955.825.200
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	81 Nilai	100.531.891.674	96.639.610.944

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan Skala Nilai Peringkat Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Baik
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 87 Tahun 2017

Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebanyak 3 (tiga) indikator diperjanjikan dalam perjanjian kinerja yang akan menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor. Pada tahun 2023, 3 (tiga) indikator yang menjadi IKU Dinas Kesehatan telah mencapai target dengan kategori "Sangat Baik". Adapun rincian realisasi per indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%	Kriteria
1	Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Point	0,46 Point	112,20%	Sangat Baik
2	Meningkatnya rumah tangga sehat	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	71%	71,53%	100,75%	Sangat Baik
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	81 Nilai	89,35 Nilai	110,31%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis diukur oleh 3 indikator kinerja yaitu Indeks Keluarga Sehat yang pada tahun 2023 memiliki target sebesar 0,41 point dengan realisasi sebesar 0,46 point dan nilai capaian sebesar 112,20% (Kategori Sangat Baik). Sedangkan, untuk indikator kinerja kedua yaitu Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS dimana pada tahun 2023 memiliki target sebesar 71% dengan realisasi sebesar 71,53% dan nilai capaian sebesar 100,75% (Kategori Sangat Baik). Selanjutnya, indikator

terakhir yaitu Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah dengan target sebesar 81 dan realisasi sebesar 89,35 serta persentase capaiannya sebesar 110,31% (Kategori Sangat Baik).

Apabila dibandingkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, adanya peningkatan capaian pada indikator indeks keluarga sehat dan persentase rumah tangga ber-PHBS di Kota Bogor. Selanjutnya, untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah terdapat kenaikan capaian dari tahun 2022 ke tahun 2023, sedangkan pada tahun 2021 Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah belum menjadi IKU Dinas Kesehatan Kota Bogor. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3 Realisasi IKU Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021-2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi		
			2021	2022	2023
Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Point	0,26 Point	0,4 Point	0,46 Point
Meningkatnya rumah tangga sehat	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	71%	69,3%	70,2%	71,53%
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	81 Nilai	NA	77,05	89,35

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu

2022							2023				
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%	Kriteria	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%	Kriteria
1	Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,40 Point	0,40 Point	100%	Sangat Baik	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Point	0,46 Point	112,20%	Sangat Baik
2	Meningkatnya rumah tangga sehat	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	70%	70,2%	100,28%	Sangat Baik	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	71%	71,53%	100,75%	Sangat Baik
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	80,01 Nilai	77,05 Nilai	96,30%	Sangat Baik	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	81 Nilai	89,35 Nilai	110,31%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, terdapat kenaikan capaian indicator apabila dibandingkan antara capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor pada Tahun 2022 dengan Tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Penjelasan masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 : Terwujudnya Keluarga Sehat

Terwujudnya keluarga sehat diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Keluarga Sehat. Hasil capaian indikator Indeks Keluarga Sehat pada tahun 2022 sebesar 100% dengan nilai realisasi 0,40 point dari target 0,40 point. Sedangkan pada tahun 2023 indikator kinerja Indeks Keluarga Sehat mengalami peningkatan nilai menjadi 0,46 point dari target 0,41 point atau mendapat capaian sebesar 112,20%.

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Rumah Tangga Sehat

Meningkatnya Rumah Tangga Sehat diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentasi rumah tangga ber-PHBS. Hasil capaian indikator persentase rumah tangga ber-PHBS tahun 2022 sebesar 100,28% dengan nilai realisasi 70,2% dari target 70%. Sedangkan pada tahun 2023 indikator kinerja persentasi rumah tangga ber-PHBS mengalami peningkatan nilai menjadi 71,53% dari target 71% atau mendapat capaian sebesar 100,75%.

Sasaran strategis 3 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah. Hasil capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah pada tahun 2022 sebesar 96,30% dengan nilai realisasi 77,05 dari target 80,01. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan nilai menjadi 89,35 dari target 81,00 atau mendapat capaian sebesar 110,31%.

3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

3.2.1 Sasaran 1

Sasaran 1 Dinas Kesehatan yaitu “Terwujudnya Keluarga Sehat”, yang diukur berdasarkan capaian indikator Indeks Keluarga Sehat. Indeks Keluarga Sehat dilaksanakan dengan pendekatan keluarga dan sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga terdapat dua belas indikator utama. Kedua belas indikator utama tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB).
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan.
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap.
4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif.
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan.
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar.
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur.
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan.
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok.
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih.
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.



Gambar 3.2 Bayi Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

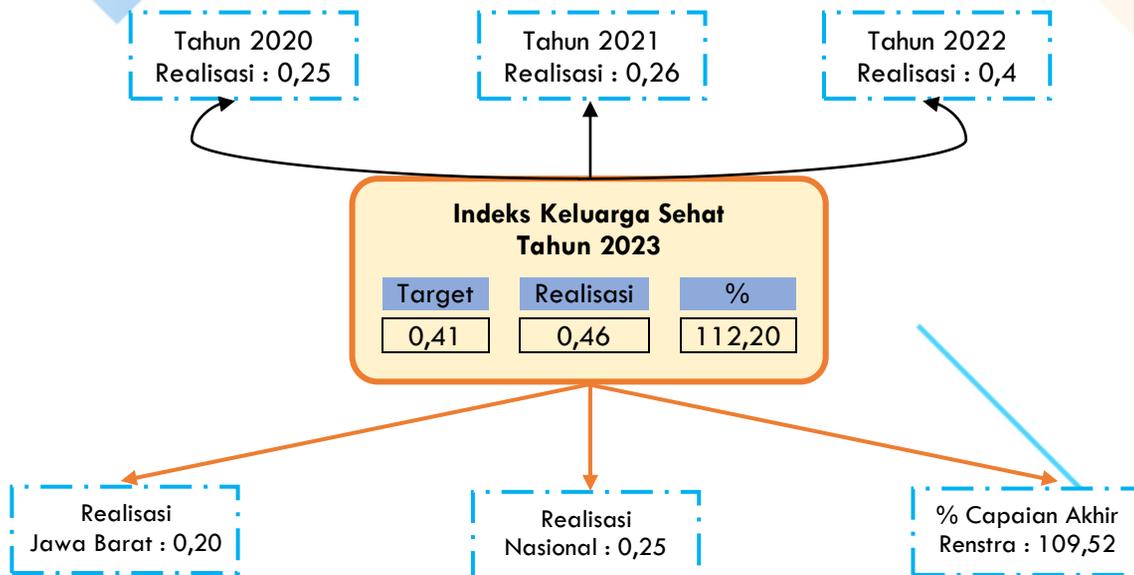
Pendekatan keluarga adalah pendekatan pelayanan oleh Puskesmas yang mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan target keluarga didasarkan pada data dan informasi dari profil kesehatan keluarga.

Adapun tujuan dari pendekatan keluarga adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar;
2. Mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) kabupaten/kota dan provinsi, melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan;
3. Mendukung pelaksanaan JKN dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN; dan
4. Mendukung tercapainya Program Indonesia Sehat.

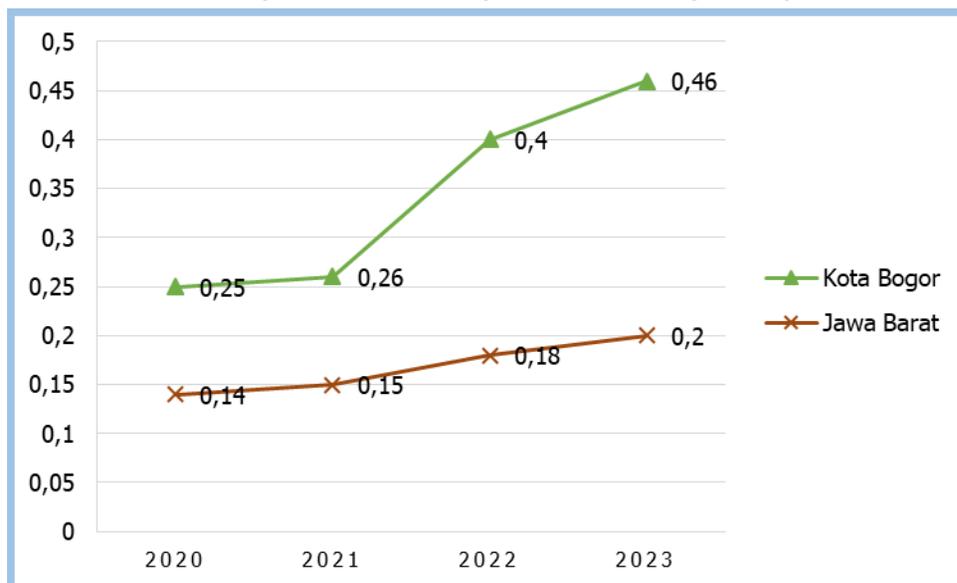
Berdasarkan Bagan 3.1 Capaian Indeks Keluarga Sehat di Kota Bogor menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Indeks Keluarga Sehat di Kota Bogor Tahun 2023 lebih tinggi 0,06 point dari capaian Tahun 2022 dengan persentase capaian sebesar 112,19%. Apabila dibandingkan dengan target akhir rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Bogor, capaian Indeks Keluarga Sehat sebesar 109,52%.

Bagan 3.1 Capaian Indeks Keluarga Sehat di Kota Bogor



Berdasarkan aplikasi keluarga sehat, capaian indeks keluarga sehat kota bogor tahun 2023 merupakan capaian tertinggi di tingkat Provinsi Jawa Barat, bahkan **melebihi angka capaian Provinsi Jawa Barat yaitu 0,20 dan melebihi capaian nasional yaitu 0,25**. Selama 4 (empat) tahun terakhir capaian indeks keluarga sehat di Kota Bogor berada diatas capaian Jawa Barat dan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 terdapat kenaikan capaian indeks keluarga sehat di Kota Bogor maupun Jawa Barat. Hal ini dapat terlihat dari Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Indeks Keluarga Sehat di Kota Bogor dengan Jawa Barat di bawah ini :

Grafik 3.1 Perbandingan Indeks Keluarga Sehat Kota Bogor dengan Jawa Barat



Berdasarkan grafik diatas, capaian Kota Bogor tahun 2020 (0,25 point) lebih tinggi sebesar 0,11 point dari capaian Jawa Barat (0,14 point). Begitu pun pada Tahun 2021, capaian Kota Bogor (0,26 point) lebih tinggi sebesar 0,11 point dari capaian Jawa Barat (0,15 point). Pada Tahun 2022, capaian Kota Bogor (0,40 point) lebih tinggi sebesar 0,22 point dari capaian Jawa Barat (0,18 point). Serta pada Tahun 2023, capaian Kota Bogor (0,46 point) lebih tinggi sebesar 0,26 point dari capaian Jawa Barat (0,20 point).

Pencapaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) didukung oleh 3 (tiga) program prioritas diantaranya yaitu :

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.

Adapun efisiensi anggaran atas capaian program tersebut yaitu sebesar 4,26% atau setara dengan Rp. 5.697.698.148. Pada Tahun 2023, Dinas Kesehatan telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mencapai target Indeks Keluarga Sehat, diantaranya yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan workshop penguatan manajemen puskesmas terintegrasi dengan PIS-PK. Hasil dari kegiatan ini yaitu diperolehnya beberapa kesepakatan antara lain :
 - 1) Puskesmas membuat Tim Manajemen Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP);
 - 2) Puskesmas melakukan tugas : manajemen puskesmas, manajemen mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat, pasien dan petugas, administrasi dan ketatausahaan (jejaring dan jaringan puskesmas, sistem informasi puskesmas dan manajemen sumber daya);
 - 3) Puskesmas sebagai penanggungjawab wilayah dalam hal kesehatan di wilayah kerjanya akan semakin diperkuat dengan aktifnya PWS tingkat desa/kelurahan oleh petugas kesehatan bersama kader;
 - 4) Puskesmas memperkuat integrasi layanan primer baik dari lintas program maupun lintas sektor;
 - 5) Puskesmas menghitung kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana, kebutuhan SDM dan lain sesuai kebutuhan layanan primer;
 - 6) Puskesmas menyelesaikan pendataan PIS PK pada tahun 2023 dan melakukan updating data pada aplikasi KS; dan
 - 7) Puskesmas dalam melakukan penyusunan RUK dan RPK tahun 2024 harus menyesuaikan dengan kebijakan Integrasi Layanan Primer (ILP).



Gambar 3.3 Workshop penguatan manajemen Puskesmas terintegrasi dengan PIS-PK

3.2.2 Sasaran 2

Sasaran 2 Dinas Kesehatan yaitu “Meningkatnya rumah tangga sehat”. Keberhasilan dari sasaran ini diukur berdasarkan capaian indikator Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Data PHBS Rumah Tangga (RT) diperoleh dari hasil survei pendataan PHBS RT yang dilakukan oleh kader yang telah diberikan pelatihan dan didampingi oleh petugas promosi kesehatan (promkes) puskesmas di masing-masing RW. Persentase Rumah tangga ber-PHBS ditentukan dari capaian 10 indikator PHBS rumah tangga. Apabila terdapat 1 dari 10 indikator yang tidak tercapai, maka akan dikategorikan sebagai rumah tangga yang tidak ber PHBS.

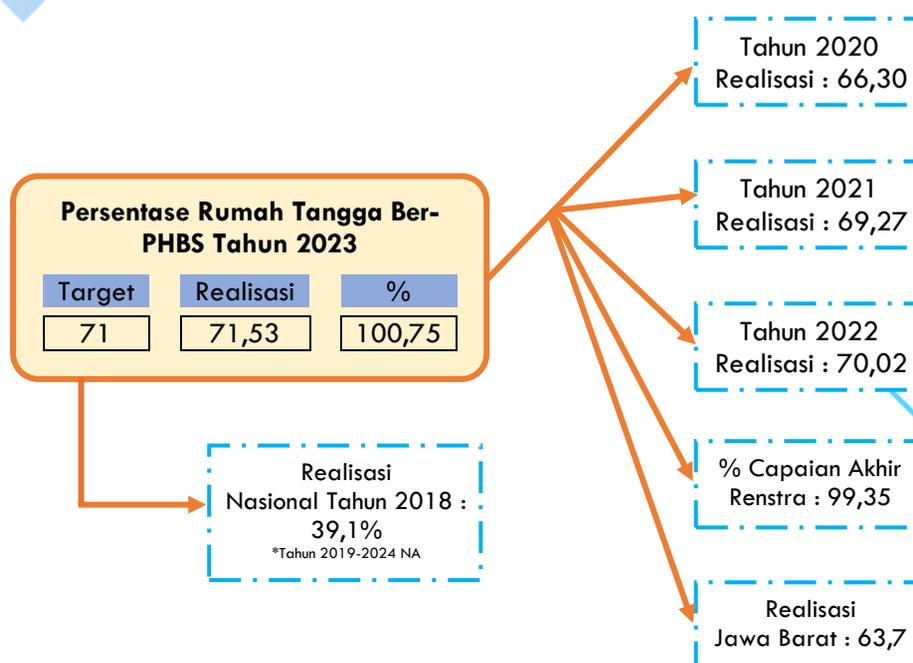
Adapun 10 indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga yang dijadikan acuan keberhasilan dari praktik perilaku hidup bersih dan sehat adalah sebagai berikut :

1. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan;
2. Pemberian ASI Eksklusif bagi anak usia 0 hingga 6 bulan;
3. Menimbang bayi dan balita (0-59 bulan) setiap bulan;
4. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih;
5. Menggunakan air bersih;
6. Menggunakan jamban sehat;
7. Memberantas jentik nyamuk;
8. Konsumsi buah dan sayur setiap hari;
9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit; dan
10. Tidak merokok didalam rumah.

Berdasarkan bagan 3.2 dapat dilihat bahwa capaian indikator persentase rumah tangga ber-PHBS di Kota Bogor menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Realisasi persentase rumah tangga ber-PHBS pada Tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 71,53% dengan persentase capaian sebesar 100,75%. Data tersebut diperoleh dari hasil pendataan kepada 214.135 rumah tangga (RT), dengan jumlah RT yang ber-PHBS sebesar 153.170 RT.

Apabila dibandingkan dengan target akhir rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Bogor, capaian persentase rumah tangga ber-PHBS sebesar 99,35%. Selain itu, bila dibandingkan dengan capaian Jawa Barat, capaian indikator persentase rumah tangga ber-PHBS di Kota Bogor lebih tinggi 7,83 point dari capaian Jawa Barat. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan angka nasional tahun 2018 capaian indikator persentase rumah tangga ber-PHBS di Kota Bogor lebih tinggi 32,43 point sedangkan untuk Tahun 2023 pada tingkat nasional sudah tidak menggunakan indikator PHBS di tatanan rumah tangga sebagai indikator kinerja promosi kesehatan.

Bagan 3.2 Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS



Pada tabel 3.2 dibawah ini dapat dilihat bahwa terdapat 4 indikator yang mengalami fluktuatif diantaranya indikator persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, dan menggunakan jamban sehat. Sedangkan, 6 indikator lainnya mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan target RPJMD, 10 indikator rumah tangga ber-PHBS telah mencapai target RPJMD pada 3 tahun terakhir (Tahun 2021-2023).

Tabel 3.5 Capaian 10 Indikator PHBS Rumah Tangga Tahun 2019-2023

No	Indikator PHBS	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan	94,4	93,8	97,7	98,2
2	Memberi Bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan)	68,4	70,4	72,1	80,3
3	Menimbang Bayi dan Balita (0-59 bulan) setiap bulan	83,7	85,7	87,1	91,7
4	Menggunakan air bersih	95,5	98,3	99,2	99
5	Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun	96,3	97,7	98,9	98,6
6	Menggunakan jamban sehat	83,4	85,1	84,7	85,3
7	Memberantas jentik nyamuk	94,8	96,1	97,5	97
8	Makan sayur dan buah setiap hari	92,5	95,5	97	97
9	Melakukan aktifitas fisik setiap hariminimal 30 menit	93,5	94,3	95,7	97,4
10	Tidak merokok di dalam rumah	67,5	70,1	71,3	74,5
KOTA BOGOR		66,3	69,3	70,02	71,53
TARGET RPJMD		68	69	70	71

Program yang mendukung capaian indikator persentase rumah tangga ber-PHBS di Kota Bogor adalah program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis sebesar 0,18% atau setara dengan Rp. 21.098.285. Selain itu, kegiatan yang mendukung pencapaian indikator adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan penguatan kapasitas programer promkes puskesmas dalam pembuatan media informasi kesehatan.



Gambar 3.6 Pertemuan penguatan kapasitas programer promkes puskesmas dalam pembuatan media informasi kesehatan.

2. Pertemuan penguatan kapasitas programer promkes puskesmas dalam pengelolaan advokasi kesehatan.



Gambar 3.7 Pertemuan penguatan kapasitas programer promkes puskesmas dalam pengelolaan advokasi kesehatan.

3. Pertemuan penguatan jejaring kemitraan potensial dalam program PHBS, Germas, dan program kesehatan lainnya.
4. Kampanye PHBS, Germas, dan program kesehatan lainnya tingkat Kota Bogor.
5. Integrasi dengan data PIS-PK untuk melakukan intervensi sesuai dengan permasalahan PHBS rumah tangga.

6. Pertemuan penguatan peran kader dalam pembinaan PHBS Rumah Tangga.



Gambar 3.8 Pertemuan penguatan peran kader dalam pembinaan PHBS RT

7. Pemicuan STBM.
8. Rapat Koordinasi PHBS RT tingkat Kota Bogor.
9. Adanya layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Kota Bogor.



Gambar 3.9 Layanan UBM di Kota Bogor

10. Penyebarluasan media informasi kesehatan melalui media promosi kesehatan.
11. Percepatan ODF di wilayah. Sehingga pada Tahun 2023 sebanyak 68 kelurahan di Kota Bogor telah ODF



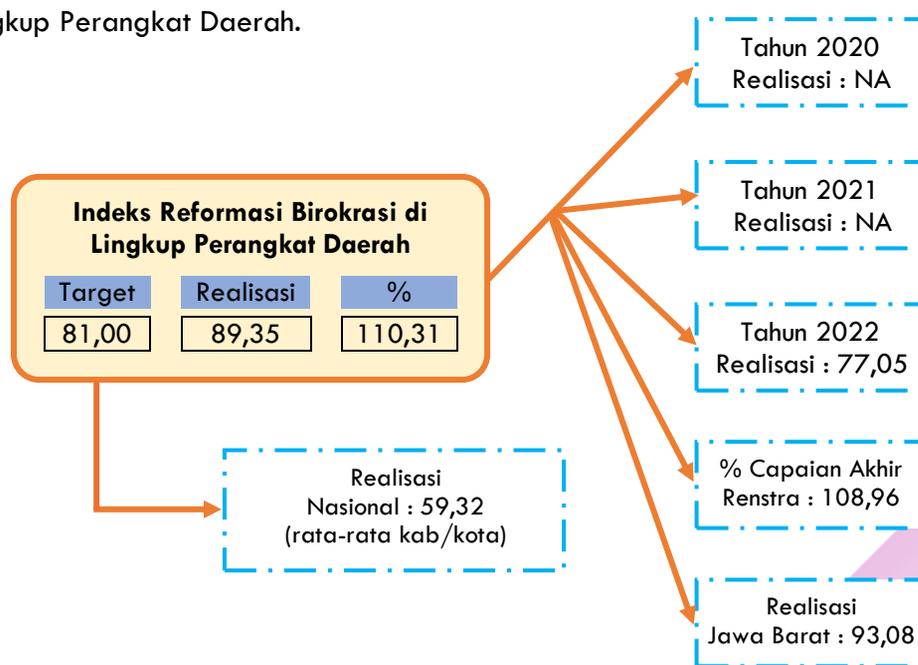
Gambar 3.10 Percepatan ODF

Keberhasilan capaian persentase rumah tangga ber-PHBS di Kota Bogor juga didukung oleh sumber daya serta kebijakan yang ada, diantaranya :

- a) Adanya kebijakan terkait penerapan PHBS diantaranya Perda Nomor 10 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Walikota Bogor Nomor 48 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Bogor, Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 tahun 2017 tentang pemberian ASI eksklusif, Surat Edaran Walikota Bogor Nomor 444/1612/Dinkes/2009 tentang Himbauan Penyediaan Sarana Pojok ASI di Kota Bogor, serta Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bogor dengan Tim Penggerak PKK Kota Bogor Nomor 440/KK.12-DKK/2009 dan Nomor 90/Skr/TP.PKK Kt Bogor/XII/2009 tentang Gerakan Sadar (Gersad) PHBS Kota Bogor.
- b) Adanya pedoman penyelenggaraan PHBS Rumah Tangga (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011).
- c) Adanya tim dalam pelaksanaan PHBS baik di tingkat kota maupun di tingkat puskesmas dengan melibatkan stakeholders terkait.
- d) Adanya dukungan dana dari berbagai sumber anggaran untuk melaksanakan kegiatan PHBS (sumber dana APBD, Dana Non Fisik, dan Bankeu).
- e) Adanya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PHBS seperti media promkes baik media cetak, media elektronik, maupun media sosial.
- f) Adanya pendataan PHBS rumah tangga yang dilaksanakan oleh kader yang didampingi oleh petugas promkes puskesmas.

3.2.3 Sasaran 3

Sasaran 3 Dinas Kesehatan yaitu “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan” dengan tolak ukur Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah.



Bagan 3.3 Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah

Berdasarkan bagan 3.3 diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator indeks reformasi birokrasi di lingkup perangkat daerah dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan. Realisasi indeks reformasi birokrasi di lingkup perangkat daerah Tahun 2023 yaitu 89,35 dengan persentase capaian 110,31%. Selain itu, bila dibandingkan dengan capaian Jawa Barat, capaian indikator Kota Bogor lebih rendah 3,73 point dari capaian Jawa Barat. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan rata-rata indeks reformasi birokrasi kabupaten/kota di Indonesia, capaian kinerja indeks reformasi birokrasi Dinas Kesehatan Kota Bogor lebih tinggi 30,03 point.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Kesehatan Kota Bogor mengikuti perkembangan kebijakan dari KemenPAN-RB. Tahun 2023 sesuai Permenpan Nomor 3 Tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melakukan penajaman pelaksanaan RB yang berdampak kepada perubahan Road Map RB Tahun 2020-2024 dan Evaluasi RB. Tujuan dilakukannya penajaman Road Map RB yaitu untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB, mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan, serta untuk mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.

Adapun poin-poin penajaman dalam Road Map meliputi :

- a. Penajaman goal setting
- b. Penetapan program/kegiatan utama yang lebih fokus dan berdampak
- c. Fokus RB Tematik untuk percepatan penyelesaian masalah hilir
- d. Penajaman Indikator Reformasi Birokrasi.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Gambar 3.11 Perubahan Kebijakan Tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Tabel 3.6 Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB

TUJUAN		SASARAN	
LAMA	BARU	LAMA	BARU
Pemerintahan yang baik dan bersih	Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel, 2. Birokrasi yang kapabel, 3. Pelayanan publik yang prima. 	<p>Sasaran RB General :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek <i>hard element</i>. 2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek <i>soft element</i>. <p>Sasaran RB Tematik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas tata kelola dan hasil pada 4 tema prioritas (pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah, dan percepatan prioritas aktual presiden) dan RB Tematik.

Sumber : Permenpan Nomor 3 Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

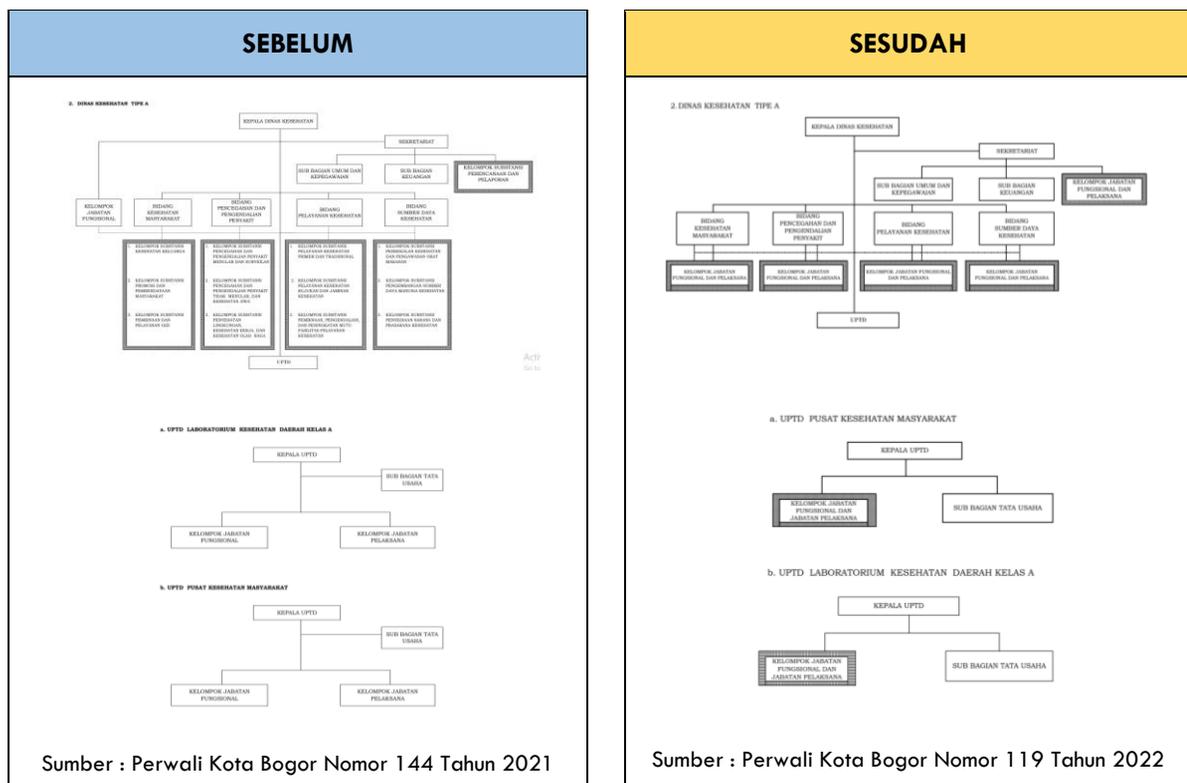
Pada Tahun 2023, Kota Bogor telah menyusun rencana aksi RB General dan Tematik. Fokus RB Tematik yang pilih oleh Kota Bogor diantaranya yaitu :

1. Penanggulangan Stunting;
2. Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peningkatan Realisasi Investasi;
4. Pengendalian Inflasi; dan
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Berdasarkan tema RB Tematik yang telah dipilih, Dinas Kesehatan ikut berperan dalam pelaksanaan RB Tematik penanggulangan stunting dan penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor. Adapun beberapa capaian dari pelaksanaan RB pada Dinas Kesehatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Penyederhanaan Birokrasi

Dinas Kesehatan telah melakukan penyederhanaan birokrasi. Hal ini merujuk kepada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor, dan dapat dilihat dari adanya perubahan dalam tata kerja jabatan struktural di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor.



Tabel 3.7 Perubahan Kebijakan Tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP pada Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023 diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim

Evaluasi Kota Bogor. Capaian implementasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Kota Bogor dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8 Capaian AKIP Pada Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2020-2023

INDIKATOR	REALISASI			TARGET	REALISASI
	2020	2021	2022	2023	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	A (82,08)	BB (78,49)	A (87,55)	A	AA (93,26)

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel diatas, AKIP pada Dinas Kesehatan Kota Bogor sempat mengalami penurunan capaian pada tahun 2020 ke tahun 2021, akan tetapi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Selain itu, pada tahun 2023 capaian AKIP pada Dinas Kesehatan Kota Bogor telah melampaui target.

3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun salah satu tujuan dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat adalah untuk membantu setiap Penyelenggara Pelayanan Publik untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 3.9 Capaian IKM Pada Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2020-2023

INDIKATOR	REALISASI			TARGET	REALISASI
	2020	2021	2022	2023	
Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	3,34	3,23	3,36	3,52	3,75

Berdasarkan tabel diatas, IKM pada Dinas Kesehatan Kota Bogor sempat mengalami penurunan capaian pada tahun 2020 ke tahun 2021, akan tetapi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 capaian AKIP pada Dinas Kesehatan Kota Bogor mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, IKM Dinas Kesehatan sebesar 3,75 dan telah melampaui target dengan capaian sebesar 106,53%.

4) Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik

Penilaian ini dilakukan oleh Ombudsman RI berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Adapun tujuan dari penilaian adalah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan.

Pada tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) unit layanan publik yang menjadi sample penilaian di Kota Bogor yaitu Dinas Pendidikan, Puskesmas Kedung Badak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Puskesmas Warung Jambu dan Dinas Kesehatan. 3 dari 7 OPD yang menjadi sample

penilaian berada dalam lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor. Adapun hasil dari penilaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10 Hasil Penilaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik

Indikator	2023			
	Nilai Kepatuhan	Zonasi	Kategori	Opini
Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di Dinas Kesehatan Kota Bogor	98,68	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Kedung Badak	93,48	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Warung Jambu	96,14	Hijau	A	Kualitas Tertinggi



Gambar 3.12 Kategori Penilaian Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

5) Penghargaan yang diperoleh oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2023

Beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut :



Dinas Kesehatan Kota Bogor mendapatkan apresiasi anugerah mitra bakti husada (MBH) terbaik tahun 2023 untuk keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perkantoran kategori OPD Tingkat II / BUMD / Swata setara Tingkat Nasional di Jakarta Convention Center (JCC).



Penghargaan *Universal Health Coverage (UHC) Award* sebagai Kota Kota yang sudah mencapai kepesertaan diatas 95% per 1 September 2023.



Peringkat pertama "*Cardipulmonary Resuscitation Pra Hospital dan Simulasi Penanganan Bencana*" pada kegiatan jambore PSC 119 Layad Rawat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.



Penghargaan *The Outstanding Oral Presentation Award on Innovative Solution at The 5 th Indonesia Tuberculosis International Research Meeting (INA TIME)* terhadap Aksi Geulis (Akselerasi Gerakan Eliminasi Tuberkulosis) di Yogyakarta.



Penghargaan 5 Peserta Teristimewa dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan IV Tahun 2023.

Proyek Perubahan : Aksi Geulis Strategi Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kota Bogor



Penghargaan sebagai daerah Pilot Project Dashboard E-money KTR.



Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim di Gedung Balai Sudirman, Jakarta.



Dinas Kesehatan Kota Bogor Mendapatkan Penghargaan Tempat Kerja yang Berkomitmen pada Program K3 Perkantoran Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.



Penghargaan Mitra Bakti Husada (MBH) Tahun 2023 yang diberikan Kementerian Kesehatan sebagai Perkantoran Tingkat II/BUMD/Swasta setara yang melaksanakan K3 Perkantoran. Penghargaan diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada tanggal 11 November 2023.



Penghargaan oleh Provinsi Jawa Barat sebagai Tempat Kerja yang Berkomitmen pada Program K3 Perkantoran. Penghargaan diselenggarakan di Gedung Sate Kota Bandung pada Tanggal 13 November 2023.



Penghargaan Mitra Bakti Husada (MBH) Tahun 2023 yang diberikan oleh Dirjen Kesmas Kementerian Kesehatan sebagai Pembina Program GP2SP dan K3 Perkantoran di Wilayah Kerja. Penghargaan diselenggarakan di Hotel JW Marriott pada tanggal 12 Desember 2023.

3.2.4 Target dan Kinerja Program Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Program Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Berdasarkan tabel 3.7 terdapat 5 (lima) indikator program yang tidak mencapai target dan 16 indikator program yang mencapai target. Adapun secara lengkap capaian masing-masing indikator program dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11 Capaian Indikator Program Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2020-2023

Program	Indikator Program	Satuan	Capaian			Target	Realisasi	%	Evaluasi
			2020	2021	2022	2023			
	Sasaran 1 : Terwujudnya Keluarga Sehat								
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	74,5	96,7	73,26	60	59,89	100,18%	Tercapai
	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	3,15	3,47	3,72	2,9	6,7	-31,03%	Tidak Tercapai
	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	3,36	3,58	3,89	3,1	7,08	-28,39%	Tidak Tercapai
	Persentase Balita berstatus gizi normal	%	85,1	83,3	85,86	86,6	86,54	99,93%	Tidak Tercapai
	Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	%	90	72	71,32	90	74,28	82,53%	Tidak Tercapai
	Prevalensi Hipertensi	%	6,4	6,62	7,46	7,9	9,66	122,28%	Tercapai
	Case Fatality Rate Covid-19	%	2,4	1,2	0,11	0,1	0,09	110,00%	Tercapai
	Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	%	0,11	0,11%	0,16	0,13	0,18	138,46%	Tercapai
	Akses sanitasi terhadap air bersih	%	99	99%	98,93	99,6	99,61	100,01%	Tercapai
	Akses jamban sehat	%	79	76,34%	82,36	84	89,64	106,71%	Tercapai
	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	%	91,1	90,46	96,11	96,2	99,7	103,64%	Tercapai

Program	Indikator Program	Satuan	Capaian			Target	Realisasi	%	Evaluasi
			2020	2021	2022	2023			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	%	87	89,7	92	95	99,26	104,48%	Tercapai
	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	%	90	0	100	100	100	100,00%	Tercapai
	Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan	%	N/A	97,4	83,12%	90	102,26	113,62%	Tercapai
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Produsen Perbekalan kesehatan Rumah tangga (PKRT) dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan	%	N/A	50%	100	86	100	116,28%	Tercapai
	Persentase Penggunaan Obat Rasional	%	75	80%	79	82	82	100,00%	Tercapai
	Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	%	N/A	64%	92,81	94	100	106,38%	Tercapai
	Sasaran 2 : Meningkatnya Rumah tangga sehat								
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	4	7,35	10,29	10,29	10,29	100,00%	Tercapai
	Predikat Kota Sehat	Predikat	Tahun 2020	Tahun 2021	Tidak dapat	Swastisaba	Belum ikut	0,00%	Tidak

Program	Indikator Program	Satuan	Capaian			Target	Realisasi	%	Evaluasi
			2020	2021	2022	2023			
			tidak ada penilaian	tidak ada penilaian	mengikuti penilaian Kota sehat sebab tidak memenuhi persyaratan terkait jumlah keluarga ODF	Wiwerda	penilaian kota sehat		Tercapai
	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	Point	3,34	3,23	3,36	3,52	3,75	106,53%	Tercapai
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	Point	A (82,08)	BB (78,49)	A (87,55)	A	AA (93,26)	100,00%	Tercapai

A. Faktor Keberhasilan Capaian Kinerja Tahun 2023

1. Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin serta menurunkan angka kematian ibu diantaranya yaitu:

- a. Rapat Koordinasi dan Diseminasi Program Kesehatan Keluarga;
- b. Penguatan dan monev pelaksanaan E-Kohort KIA dan MPDN;
- c. Penguatan pelayanan Antenatal Care;
- d. Penguatan dan Monev Kelas Ibu Hamil dan Kelas Balita;
- e. Pendampingan Program *Expanding Maternal & Neonatal Survival (EMAS)* untuk Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas.

2. Case Fatality Rate Covid-19

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian akibat Covid-19 di Kota Bogor diantaranya yaitu:

- a. Pelaksanaan Tracing Cepat 1x24 jam terhitung semenjak kasus rilis di *New All Record (NAR)*;
- b. Data Covid-19 dilakukan analisa setiap minggunya, dan
- c. Tersedianya kapasitas ruang isolasi untuk kasus Covid-19 di Kota Bogor.

3. Prevalensi Hipertensi

Dinas Kesehatan Kota Bogor memiliki program inovasi Pamong Walagri. Pamong Walagri adalah deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular yang dikhususkan untuk ASN sehingga meningkatkan cakupan deteksi dini karena sasaran deteksi dini (usia produktif) banyak terdapat di tempat kerja. Peningkatan cakupan deteksi berdampak kepada meningkatnya angka penemuan kasus sehingga target penemuan kasus hipertensi tercapai.

Tercapainya target penemuan kasus juga tidak terlepas dari adanya integrasi dan kolaborasi dengan lintas program dimana tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Bogor mencetuskan Paguyuban Salapan (9 sasaran dalam 9 layanan). Sembilan sasaran yang dimaksud yaitu masyarakat umum, ASN, Wanita Usia Subur, perkantoran swasta, industri, SMU/ sederajat, Universitas, Klinik, dan Rumah sakit. Sembilan layanan yang dimaksud adalah deteksi gizi, deteksi hipertensi, deteksi diabetes melitus, deteksi IVA-Sadanis, deteksi kesehatan jiwa, pemeriksaan tajam penglihatan, deteksi tajam pendengaran, deteksi dini penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan Upaya Berhenti Merokok. Selain itu, telah dilaksanakannya kegiatan deteksi dini untuk menemukan kasus hipertensi dan kegiatan promotif preventif pencegahan penyakit tidak menular.

4. Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

Kota Bogor bekerjasama dengan RS dr. H. Marzoeqi Mahdi (RSMM) pada kegiatan ACT (*Assertive Community Treatment*) dimana RSMM, puskesmas, dan lintas sektor lainnya bersama-sama melakukan pendampingan kepada pasien

ODGJ yang sudah melewati masa rawat dari RS agar siap diterima dan menjalani kehidupan di masyarakat. Sehingga ada rujuk balik dari RSMM ke puskesmas pada pasien ODGJ.

Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Bogor bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Keperawatan UI dalam membentuk Kelurahan Desa Siaga Jiwa. Petugas puskesmas bekerjasama dengan mahasiswa dalam melakukan kegiatan deteksi dan penemuan kasus ODGJ.

Kegiatan lainnya yang telah dilakukan yaitu :

- a. Adanya koordinasi dan informasi dari lintas program dan lintas sektor dalam penemuan kasus baru di wilayah;
 - b. Penemuan kasus, deteksi dini, dan penanganan kasus ODGJ dilaksanakan secara promotif, preventif, dengan kegiatan dalam dan luar gedung sehingga dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai standar.
 - c. Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan dan kegiatan peningkatan wawasan tentang kesehatan jiwa (keswa) bagi kader dan masyarakat.
5. Akses sanitasi terhadap air bersih
- Faktor keberhasilan dari capaian indikator akses sanitasi terhadap air bersih yaitu:
- a. Peningkatan jumlah pelanggan PDAM;
 - b. Adanya perubahan definisi operasional pada sarana air minum layak.
6. Akses jamban sehat
- Faktor keberhasilan dari capaian indikator akses jamban sehat yaitu adanya komitmen semua pihak baik kepala daerah maupun masyarakat dalam penuntasan ODF yang ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya surat komitmen rencana penuntasan masalah ODF oleh Sekretaris daerah dan Kepala OPD terkait.
7. Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional
- Faktor keberhasilan dari capaian indikator persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional yaitu adanya komitmen lintas sektor serta dukungan stakeholder dalam upaya percepatan *Universal Health Coverage* (UHC) yang dituangkan dalam Instruksi Walikota Bogor Nomor 441/4429-Dinkes tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bogor, Surat Keputusan Walikota Bogor tentang Pembentukan Tim Percepatan Jaminan Kesehatan Menyeluruh (*Universal Health Coverage*) Program Jaminan Kesehatan Kota Bogor, dan Nota Kesepakatan Rencana Kegiatan dengan BPJS Kesehatan.
8. Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)
- Faktor keberhasilan dari capaian indikator nakes yang mempunyai STR yang memiliki jaminan kesehatan nasional yaitu
- a. Pembuatan surat peringatan dan pemanggilan secara rutin kepada nakes terkait masa berlaku STR.

- b. Nakes yang bersangkutan kooperatif dalam mengurus STR dan langsung menindaklanjuti.
9. Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi
Tercapainya persentase tenaga kesehatan lulus uji kompetensi dikarenakan adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan, Tim penguji dan Jabfung.
10. Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan
Faktor keberhasilan dari capaian indikator ini adalah
- Adanya perencanaan kebutuhan (renbut) SDM dengan mengikutsertakan seluruh lintas program.
 - Pemenuhan tenaga kesehatan melalui berbagai sumber anggaran (APBD, BLUD, PTT) dengan proses rekrutmen sesuai ketentuan.
11. Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan
Faktor keberhasilan dari capaian indikator ini adalah
- Melakukan sosialisasi dan pendampingan standar perusahaan rumah tangga (PRT) produsen PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu kepada kelompok pelaku usaha.
12. Persentase Penggunaan Obat Rasional
Faktor keberhasilan dari capaian indikator ini adalah
- Dilakukannya rekapitulasi, monitoring dan evaluasi per triwulan laporan capaian Penggunaan obat rasional (POR) Puskesmas.
 - Melakukan sosialisasi target penggunaan obat rasional kepada lintas program dan penulis resep.
13. Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan
Faktor keberhasilan dari capaian indikator ini adalah
- Adanya peningkatan frekuensi penyuluhan Keamanan Pangan, tadinya 3 kali setahun jadi 4 kali.
 - Meningkatnya kerjasama lintas sektor (Badan POM, Balai POM Bogor, Kemenag, dan SKPD lain di Pemkot) dalam melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha IRTP.
 - Adanya dana DAK Non Fisik POM.
14. Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Kegiatan yang mendukung tercapainya target pada tahun 2023 diantaranya FGD Penguatan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Kota Bogor, Sosialisasi dan Penguatan Peran Pemegang Kebijakan dalam Pengembangan Kelurahan / RW Siaga Aktif, adanya pembinaan RW Siaga Strata Pratama, adanya Penguatan UKBM lainnya, serta tersedianya Jasa Tenaga Kesehatan bagi Kader Kelurahan Siaga Aktif selama 12 bulan dalam rangka memberikan motivasi pada kader Kelurahan Siaga sehingga diharapkan dapat meningkatkan strata Kelurahan Siaga Aktif.

15. Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan

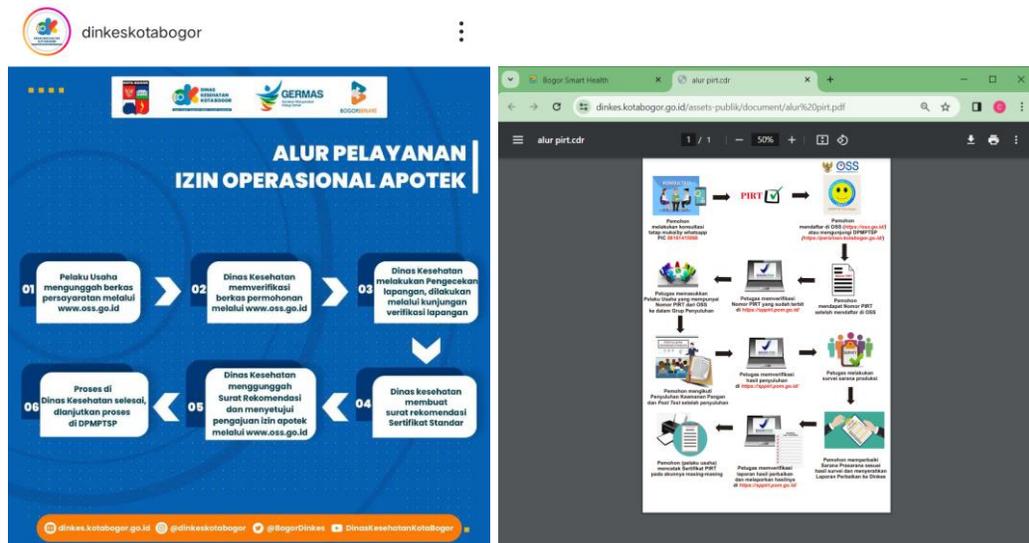
Faktor keberhasilan dari capaian indikator ini adalah

- a. Adanya komitmen dari Dinas Kesehatan dalam memberikan layanan sesuai dengan standar pelayanan publik dan adanya maklumat pelayanan. Selain itu, standar dan maklumat pelayanan telah dipublikasikan melalui website maupun media sosial Dinas Kesehatan Kota Bogor.



Gambar 3.13 Publikasi Maklumat dan Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bogor

- b. Alur pelayanan telah dipublikasikan melalui website maupun media sosial Dinas Kesehatan Kota Bogor.



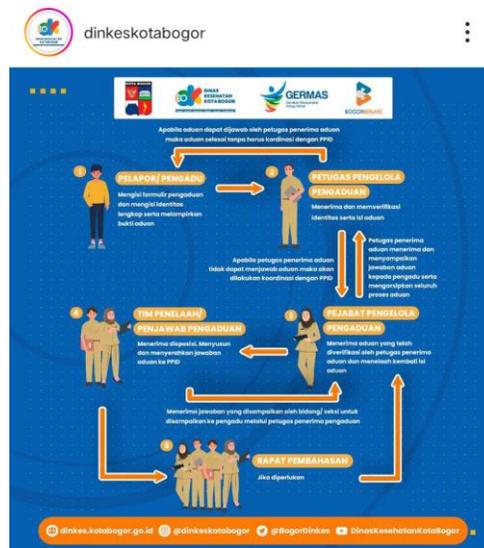
Gambar 3.14 Publikasi Alur Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bogor

- c. Sarana dan prasarana telah dilengkapi sesuai standar dan ramah pada kelompok difabel, lansia, perempuan dan anak.



Gambar 3.15 Sarana dan prasarana telah sesuai standar dan ramah pada kelompok difabel, lansia, perempuan dan anak

- d. Terdapat tim yang melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat.



Gambar 3.16 Publikasi Alur Pengaduan

16. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan

Faktor keberhasilan dari capaian indikator ini diantaranya yaitu :

- a. Telah ditindaklanjutinya Evaluasi SAKIP Tahun 2022 berdasarkan LHE AKIP Dinas Kesehatan Kota Bogor.
- b. Adanya pemberian *reward and punishment* dari keberhasilan dan kegagalan kinerja.
- c. Tersedianya dokumen Indikator Kinerja Individu telah ditetapkan dengan SK Kepala Dinas.
- d. Telah dilakukan perbaikan terhadap dokumen LKIP Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2020.
- e. Pelaporan dokumen LKIP Tahun 2022 melalui website <https://esr.menpan.go.id/> yang tepat waktu.

B. Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Tahun 2023

- 1. Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup dan Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

Penyebab : Pencatatan dan pelaporan kematian ibu, bayi, dan balita pada faskes menjadi lebih baik, sehingga semua kematian dilaporkan. Hal ini didukung juga dengan

adanya Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/7052/2023 tentang Kewajiban untuk melakukan pelaporan kematian ibu, bayi, dan balita melalui aplikasi *maternal perinatal death notification* (MPDN) dan Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/7767/2023 tentang Kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelaporan kematian ibu dan perinatal melalui aplikasi *maternal perinatal death notification* (MPDN) yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Upaya yang telah dilakukan :

- a. Pendampingan Program EMAS untuk RS dan Puskesmas;
- b. Kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam mencegah kematian bayi;
- c. Pengawasan ketat terhadap faskes rujukan dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal dan bayi; dan
- d. Kunjungan rumah deteksi resiko pada neonatal.

2. Persentase Balita berstatus gizi normal

Penyebab : Apabila dilihat dari data capaian tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, akan tetapi belum mencapai target tahun 2023. Salah satu penyebabnya yaitu belum optimalnya pemantauan praktek PMBA.

Upaya yang telah dilakukan :

- a. Pemberian tablet tambah darah (TTD) pada Ibu hamil;
- b. Pemberian makanan tambahan (PMT);
- c. Pelaksanaan kelas ibu hamil dan konseling menyusui;
- d. Pelaksanaan konseling/kelas pelatihan pemberian makan bayi dan anak (PMBA); dan
- e. Penggerakkan masyarakat untuk menimbang balita melalui RW Siaga.

3. Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus

Penyebab :

- a. Banyak kasus yang *double input*;
- b. Pasien pindah pengobatan tanpa konfirmasi;
- c. Pasien meninggal; dan
- d. Kasus lost to follow up.

Upaya yang telah dilakukan :

- a. Bimbingan teknis ke fasyankes;
- b. Kolaborasi dengan LSM;
- c. Kolaborasi lintas program;
- d. Pemantauan kasus mangkir; dan
- e. Melibatkan kader dalam pemantauan kasus mangkir dan pemantauan pengobatan.

4. Predikat Kota Sehat

Penyebab : Pada saat penilaian, Kota Bogor belum mencapai minimal 80% ODF yang merupakan syarat utama untuk dapat mengikuti penilaian predikat Kab/Kota Sehat.

Upaya yang telah dilakukan : Penguatan koordinasi dan komitmen lintas sektor serta pemangku kepentingan dalam upaya percepatan ODF dan pemutakhiran data BABS. Adanya usulan penguatan perencanaan dan penganggaran dalam penuntasan ODF, baik dari segi anggaran pemerintah maupun CSR.

3.2.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2023 dengan target jangka menengah, terdapat 10 (sepuluh) indikator yang tidak mencapai target. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2023	%
Sasaran 1 : Terwujudnya Keluarga Sehat					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	55	59,89	91,11%
	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	2,8	6,7	-39,29%
	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	3	7,08	-36,00%
	Persentase Balita berstatus gizi normal	%	87	86,54	99,47%
	Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	%	90	74,28	82,53%
	Prevalensi Hipertensi	%	8,4	9,66	115,00%
	Case Fatality Rate Covid-19	%	0,1	0,09	110,00%
	Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	%	0,14	0,18	128,57%
	Akses sanitasi terhadap air bersih	%	100	99,61	99,61%
	Akses jamban sehat	%	86	89,64	104,23%
	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	%	96,3	99,7	103,53%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	%	100	99,26	99,26%

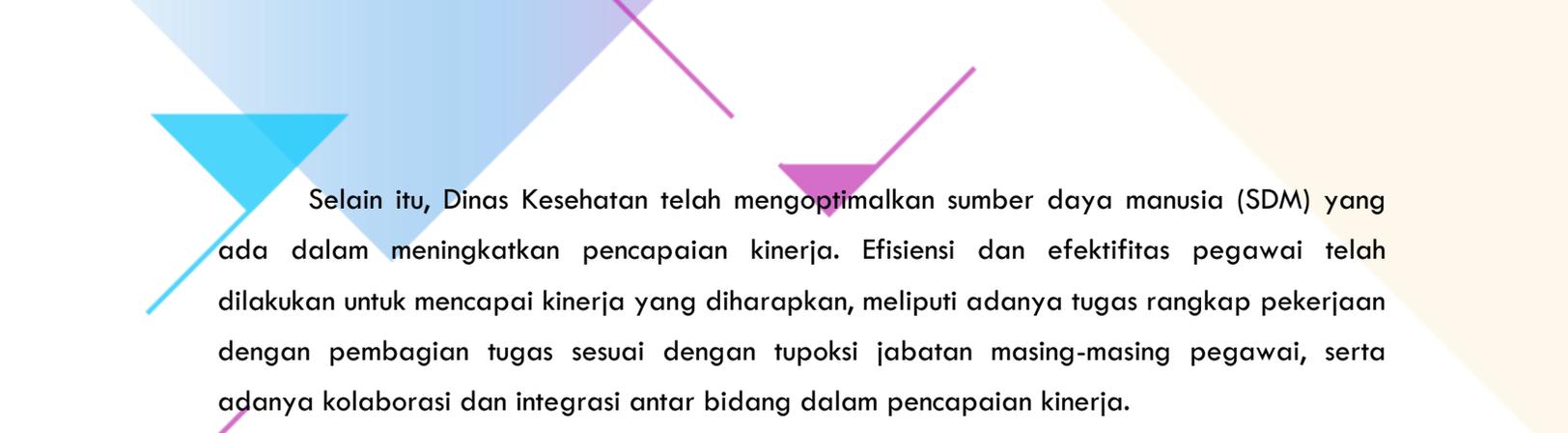
Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2023	%
	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	%	100	100	100,00%
	Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan	%	95	102,26	107,64%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan	%	90	100	111,11%
	Persentase Penggunaan Obat Rasional	%	83	82	98,80%
	Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	%	96	100	104,17%
Sasaran 2 : Meningkatnya Rumah tangga sehat					
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	11	10,29	93,55%
	Predikat Kota Sehat	Predikat	Swastisaba Wiwerda	Belum ikut penilaian kota sehat	0,00%
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	Point	3,55	3,75	105,63%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	Point	A	AA (93,26)	100,00%

3.2.6 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\% \text{ Capaian Penggunaan Anggaran atau biaya}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 233.711.057.804, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 242.263.688.865. Berdasarkan rumus efisiensi biaya diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level perangkat daerah adalah 111,69%. Berdasarkan besaran penggunaan anggaran, maka dapat diasumsikan telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya biaya pada Dinas Kesehatan Kota Bogor.



Selain itu, Dinas Kesehatan telah mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam meningkatkan pencapaian kinerja. Efisiensi dan efektifitas pegawai telah dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan, meliputi adanya tugas rangkap pekerjaan dengan pembagian tugas sesuai dengan tupoksi jabatan masing-masing pegawai, serta adanya kolaborasi dan integrasi antar bidang dalam pencapaian kinerja.

3.3 Realisasi Anggaran

Penilaian kinerja capaian keuangan diukur berdasarkan pengukuran kinerja keuangan terhadap belanja yang mendukung pelaksanaan pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor. Berikut capaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023 :

Tabel 3.12 Kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023

Sasaran	Program	Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya Keluarga Sehat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	127.985.693.001	122.680.881.365	95,86
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	4.774.771.520	4.423.483.208	92,64
	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	907.788.200	866.192.000	95,42
Meningkatnya rumah tangga sehat	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	11.955.825.200	11.934.726.915	99,82
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	96.639.610.944	93.805.774.316	97,07
Total		242.263.688.865	233.711.057.804	96,47

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa total pagu anggaran yang menunjang 5 (lima) program di Dinas Kesehatan Kota Bogor sebesar Rp. 242.263.688.865 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 233.711.057.804 (96,47%). Selain itu, capaian serapan anggaran menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.13 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021-2023

No	Program	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			%		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	166.679.130.421	148.234.803.580	127.985.693.001	130.262.160.443	133.342.636.080	122.680.881.365	78,15	89,95	95,86
2	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	21.158.388.076	11.133.463.888	4.774.771.520	19.419.616.615	10.042.458.574	4.423.483.208	91,78	90,20	92,64
3	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	606.888.000	530.618.700	907.788.200	501.206.500	468.829.300	866.192.000	82,59	88,36	95,42
4	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	14.931.976.000	9.659.464.700	11.955.825.200	14.718.841.550	9.518.434.650	11.934.726.915	98,57	98,54	99,82
5	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	85.863.332.223	86.716.272.871	96.639.610.944	81.816.223.459	83.387.403.495	93.805.774.316	95,29	96,16	97,07
Total		289.239.714.720	256.274.623.739	242.263.688.865	246.718.048.567	236.759.762.099	233.711.057.804	85,30	92,39	96,47

Pagu Anggaran tahun 2021 lebih banyak daripada tahun 2022 dan tahun 2023 dikarenakan tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Bogor mendapatkan dana tambahan bersumber anggaran DBH-CHT untuk penanggulangan Covid-19.

BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023, 3 (tiga) indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Kesehatan telah mencapai target. Capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran dapat diinterpretasikan menggunakan penilaian sebagai berikut :

Skala Capaian (%)	Kategori
85 - 100	Sangat Baik
70 - <85	Baik
55 - <70	Cukup
<55	Kurang

Berdasarkan kategori sebagaimana tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa capaian dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Bogor termasuk dalam kategori Sangat Baik. Begitu juga halnya dengan realisasi kinerja anggaran Dinas Kesehatan Kota Bogor yang telah melampaui capaian pada tahun 2022 (92,39%) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 96,47%.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian IKS per Triwulan dan mengadakan pertemuan monitoring dan evaluasi di Dinas Kesehatan. Selain itu, adanya dukungan anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp.119.265.790.401 yang terbagi dalam 3 (tiga) program yaitu :
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.115.581.609.661;
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp.3.420.262.640;
 - c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebesar Rp.263.918.100
2. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan capaian rumah tangga ber-PHBS pada tahun 2024 yaitu melaksanakan kampanye PHBS, Germas, dan program kesehatan lainnya tingkat Kota Bogor, melaksanakan kampanye Germas melalui penguatan dan pengembangan kampung Germas, pertemuan penguatan peran PKK dalam pembinaan PHBS rumah tangga, kampanye kesehatan pada peringatan hari tanpa tembakau sedunia dan hari cuci tangan pakai sabun sedunia, pelayanan kesehatan melalui kegiatan mobil curhat, pembinaan germas di wilayah, rakor PHBS rumah tangga tingkat Kota Bogor, penguatan implementasi germas di puskesmas, dan penyebarluasan media informasi kesehatan melalui media promosi kesehatan. Adapun

alokasi anggaran Tahun 2024 guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp.13.775.197.200 melalui program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

3. Upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian RB Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
 - a. Memperkuat kolaborasi dan integrasi dengan lintas program maupun lintas sektor dalam rangka penanggulangan stunting dan penanggulangan kemiskinan.
 - b. Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan setiap Tim Kerja serta mengoptimalkan pendokumentasian SJP lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor.
 - c. Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP Dinas Kesehatan Kota Bogor.

Adapun alokasi anggaran Tahun 2024 guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp.115.746.867.076 melalui program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023 disusun agar menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pencapaian yang ada dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2019-2024 sehingga dapat dijadikan bahan acuan dalam perbaikan dimasa yang akan datang.